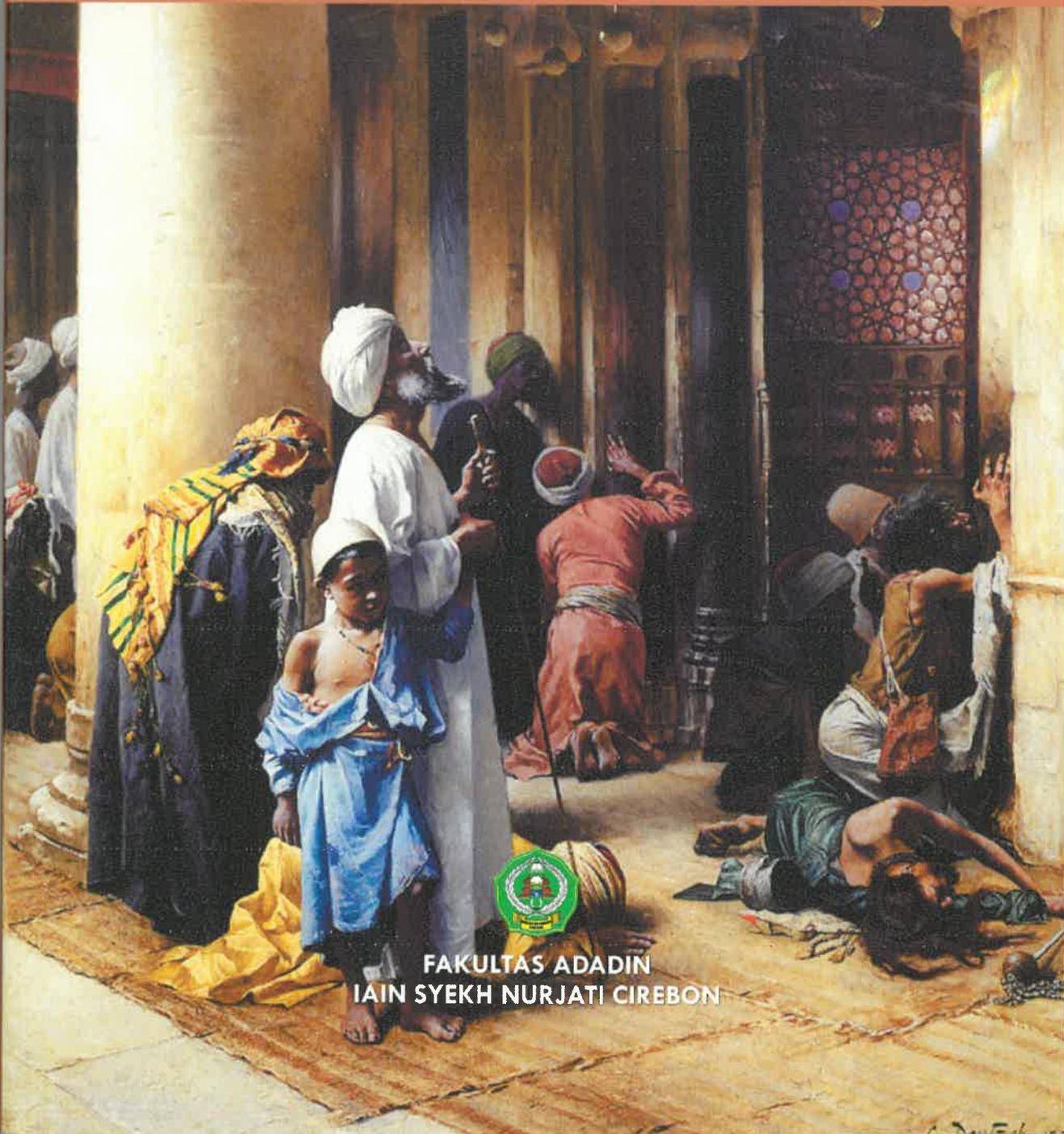


Vol. 9 No. 2 Desember 2012

ISSN: 1693-4342

# inspirasi

JURNAL FAKULTAS ADADIN



FAKULTAS ADADIN  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Vol. 9 No. 2 | Desember 2012

# inspirasi

JURNAL FAKULTAS ADADIN

Penanggungjawab :

Dr. H. Adib, M.Ag

Redaktur :

Dr. Siti Fatimah

Editor :

Drs. Hajam, M.Ag

Desain Grafis :

Ahmad Faqih Hasyim, M.Ag

Kesekretariatan :

H. Bisri, M.Fil.I

Zaenal Masduqi, M.Ag., MA

Dedeh Nur Hamidah, M..Ag

Ahmad Lutfi, M.Ag

H. Umayah, M.Ag

Penerbit

Nurjati Press

Jl. Perjuangan Sunyaragi

Kota Cirebon 45132 Telp.: (0231) 481264 Fax.: (0231) 489926

e-mail: gmail.com

dicetak oleh :

CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara

Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254

email : cirebonpublishing@yahoo.co.id



PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN  
BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA  
(PENGUATAN CIVIL SOCIETY MELALUI PENDEKATAN  
MULTIKULTURALISME DAN INKLUSIVISME)

Taufik Hidayatulloh  
(Sekretaris Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam (ADPISI)  
DPW DKI Jakarta dan Dosen Universitas Negeri Jakarta)

**Abstraksi**

.....  
Pendidikan agama harus mampu mengimbangi faktor-faktor eksternal di luar dirinya. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah tantangan budaya-multikulturalisme (keragaman etnis) tantangan pluralisme (keragaman agama) yang menjadi simbol identitas bangsa yang dilambangkan dengan konsep 'Bhineka Tunggal Ika'. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, mampukah dunia pendidikan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai multikulturalisme? Yaitu, pendidikan yang mengakui dan menghormati keragaman etnis, agama, suku dan ras.  
.....

*Kata kunci: pendidikan, Multikultural, pluralisme*

*"Mereka yang buta huruf mengenai masa depan bukan lagi individual yang tidak dapat membaca. Mereka adalah orang yang tidak tahu cara belajar mengenai cara belajar." (Alvin Tofler)*

*We created by the Creator to be creature with creativity (Andreas Harefa)*

**A. PENDAHULUAN**

Beberapa tantangan bangsa Indonesia ke depan-untuk menyebut salah satunya-adalah tentang pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan krusial bangsa yang menuntut banyak perhatian, baik dari aspek sistem, kurikulum, metodologi dan aspek implementasi di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang humanis atau humanisasi

pendidikan, baik dalam prakteknya maupun tingkat implementasinya masih lebih banyak mengarah pada kondisi sebaliknya, yaitu 'dehumanisasi'. Inilah yang sering disebut oleh Paulo Freire, sebagai 'dehumanisasi', yaitu keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi manusia. Bukan hanya menandai mereka yang kemanusiaannya telah dirampas, melainkan dengan cara yang berlainan menandai pihak yang telah merampas kemanusiaan itu dan merupakan pembengkokan cita-cita untuk menjadi manusia yang lebih utuh.

Dengan latar belakang di atas, maka pendidikan Agama-meminjam istilah Malik Fajar-masih menyimpan banyak persoalan yang menjadikannya agak tertatih-tatih, kalau tidak malah kehilangan kreatifitas dalam merespon perkembangan zaman. Beberapa lembaga pendidikan Agama yang ada pada saat ini, masih saja secara kaku (rigid) mempertahankan pola shalafiyah yang dianggapnya masih *sophisticated* dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal sebagai suatu institusi pendidikan keagamaan dan sosial, pendidikan Agama dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya.

Bentuk pendidikan Agama yang hanya mendasarkan pendidikannya pada kurikulum 'salafy' dan mempunyai ketergantungan yang berlebihan terhadap figur pengajar, tampaknya merupakan persoalan tersendiri, jika dikaitkan dengan tuntutan perubahan zaman yang senantiasa melaju dengan cepat. Bentuk pendidikan yang demikian, menurut hemat saya, akan mengarah pada pemahaman agama yang parsial, karena agama hanya dipahami dengan pendekatan normatif semata. Belum lagi *out put* (siswa) yang memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi problematika zaman, maka mereka cenderung mengambil jarak dengan proses perkembangan zaman yang serba cepat.

Kelemahan di bidang metodologi, telah umum diketahui bahwa pendidikan agama mempunyai tradisi yang kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun, karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Menurut Martin Van Bruinessen, proses transmisi merupakan penerimaan secara *taken for granted*. Tradisi pengajaran yang demikian, menurut Thalhah Hasan, memberikan dampak lemahnya kreatifitas. Inilah yang saya katakan sebagai pendidikan alienatif, yakni teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer.

Hal lain yang sering kali terlupa adalah terjadinya disorientasi, yakni pendidikan agama kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini terjadi perubahan yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini pendidikan agama mengalami dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar (baca: arus modernisasi).

Berangkat dari latar belakang di atas, saya hendak memberikan satu tawaran yang bersifat solutif, bahwa pendidikan agama harus mampu mengimbangi faktor-faktor eksternal di luar dirinya. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah tantangan budaya-multikulturalisme (keragaman etnis) tantangan pluralisme (keragaman agama) yang menjadi simbol identitas bangsa yang dilambangkan dengan konsep 'Bhineka Tunggal Ika'. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, mampukah dunia pendidikan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai multikulturalisme? Yaitu, pendidikan yang mengakui dan menghormati keragaman etnis, agama, suku dan ras. Pertanyaan dan pernyataan tersebut perlu dijawab, mengingat kompleksitas problematika pendidikan di negeri ini.

## **B. PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL**

Pendekatan multikultural relatif baru-setidaknya dalam dunia pendidikan—dianggap sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Wacana ini mulai ramai terdengar di kalangan akademis, praktisi budaya dan aktivis di awal tahun 2000 di Indonesia. Hal itu makin dirasakan terutama pada masa otonomi dan desentralisasi. Tanpa pendekatan multikultur, disintegrasi bangsa yang semula dianggap ancaman mungkin akan menjadi kenyataan. Pendekatan multikultur sangat cocok dan sejalan dengan pengembangan demokrasi yang mulai dijalankan.

Multikultur juga menjadi *counter* yang baik terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam pendekatan multikultur, titik pusat perhatian dan upaya manusia adalah mengembangkan integrasi kebudayaan dalam pengertian ideal, jadi bukan integrasi sosial yang mudah goyah. Negara-negara yang menjalankan konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada sudah lama menerapkan multikultur. Pendekatan tersebut dilakukan dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam.

Tujuannya ialah memajukan dan memelihara integrasi nasional dalam demokrasi. Untuk mengoperasikan konsep multikultur itu, berbagai model telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah dasar Amerika Serikat dan hasilnya dievaluasi. Demokrasi dan masyarakat madani memiliki hubungan kausal yang terikat satu sama lain.

Pendidikan merupakan lapangan yang sentral dalam upaya menerjemahkan gagasan multikulturalisme, sehingga menjadi kenyataan perilaku. Agar gagasan multikultur terserap luas dan efektif, pendekatannya harus disebar, dikelola dan diwujudkan secara konsisten dalam pendidikan nasional. Upaya mewujudkan integrasi nasional harus berpusat pada pengembangan integrasi kebudayaan secara nasional. Dalam hal ini, pendidikan multikultur memegang peranan kunci.

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai "pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan". Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Multikulturalisme dalam praktek pendidikan merupakan suatu tuntutan demokrasi. Upaya kita untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang multikultural, hanya dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan nasional, merupakan proses pemberdayaan manusia Indonesia yang bebas tetapi juga sekaligus terikat kepada suatu kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang bersatu, di dalam wacana kebudayaan Indonesia yang terus menerus berkembang.

Dalam pendidikan multikulturalisme, setiap komunitas budaya, etnik, agama, dan komunitas apapun dapat menegaskan keberadaannya, tetapi dapat berpartisipasi secara adil dan memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. (Majalah Al-Wasathiyah; 12) Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural telah cukup lama dirasakan cukup mendesak bagi negara-bangsa majemuk, seperti Indonesia. Berhadapan

dengan meningkatnya “multikulturalisme” di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep, dan praktik pendidikan “multikultural” semakin relevan dan *timely*.

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire (2000), pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.

Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

H.A.R. Tilaar (2002), mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural *domain* atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau *politics of recognition*, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas “merayakan

keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Karenanya, multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antarsuku bangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan berbagai tempat lainnya (Suparlan: 2001).

### **C. PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN INKLUSIF**

Di samping pendidikan yang berwawasan multikultural di atas, dimensi inklusivisme—untuk tidak mengatakan pluralisme—dalam hal ini juga tidak bisa diabaikan. Inklusivisme dalam pendidikan agama adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karenanya, inklusivisme dalam pendidikan agama bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis.

Franz Magnis Suseno, memberikan catatan yang patut dikaji oleh masyarakat agama-agama, bahwa tantangan agama-agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik, baik antar-umat agama maupun inter-umat agama itu sendiri. Di sinilah, arti penting inklusivisme pendidikan agama sebagai jembatan untuk meminimalisir dan mengakhiri konflik tersebut. Upaya untuk mencairkan kebekuan tersebut juga bisa dipercepat dengan jalan mengintensifkan pendidikan multikulturalisme dengan wawasan yang inklusif di sekolah-sekolah.

Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusifitas. Sehingga, dengan begitu, masyarakat akan tumbuh pemahaman yang tidak inklusif. Harmonisasi agama-agama di tengah kehidupan masyarakat tidak dapat terwujud. Tertanamnya kesadaran seperti itu niscaya akan menghasilkan corak paradigma beragama yang rigid dan tidak toleran.

Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk merubah paradigma pendidikan yang eksklusif menuju paradigma pendidikan agama yang toleran dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau tidak mau harus 'dibongkar ulang'. Sebab cara pemahaman teologi yang eksklusif dan intoleran, pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-

agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain. Menganggap agama yang satu lebih baik dari agama lain adalah ofensif, berpandangan sempit.

Saat ini masih belum banyak dijumpai buku-buku agama dengan wawasan seperti dijelaskan di atas. Kita masih miskin dalam hal itu dan mesti belajar banyak dan menulis ulang. Penulisan ulang buku agama dan memasukkannya ke dalam kurikulum berbasis multikulturalisme yang berwawasan inklusif harus dilakukan. Untuk selanjutnya dapat dipakai buku ajar dan menjadi panduan guru-guru.

Amin Abdullah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah, berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu keragaman agama, dan dialog antar umat beragama. Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai toleransi kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif.

Sejatinya multikulturalisme dan wawasan inklusifisme ini harus berkembang melebihi toleransi untuk mencapai pemahaman yang konstruktif. Kita harus memiliki sekolah-sekolah yang giat mengajarkan agama-agama di dunia dalam konteks bidang studi sosial atau sejarah. Kita membutuhkan pemimpin agama yang terlatih yang tidak hanya mampu menanamkan keyakinan yang dalam pada komunitasnya, namun juga terpelajar secara agama, dan mampu mencegah para agamawan lainnya salah menafsirkan dan mencemarkan komunitas agama lain.

Karenanya, baik multikulturalisme maupun keragaman agama sebagai desain Tuhan (*design of God*) harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Namun tidak sekadar berhenti pada wacana pentingnya isu di seputar keragaman agama dan multikulturalisme, akan tetapi lebih diejawantahkan pada tataran praksis melalui jalur pendidikan dan pelatihan-pelatihan bersama dengan melibatkan berbagai komunitas lintas agama dan etnis untuk saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*) dan membangun sikap saling menghargai (*ta'awun*) berdasarkan pengakuan atas persamaan (*al-musawah*) dan keadilan (*al-'adalah*).

Berpijak pada kerangka pemikiran ini, paradigma multikulturalisme dan inklusifisme diharapkan menjadi solusi konflik kemanusiaan selama ini. Menurut saya, dalam membangun jati diri dan karakter bangsa, saya kira, mustahil dilakukan jika pendidikan yang dijalankan selama ini tidak mengakomodasi dan merawat multikulturalisme dan keragaman agama. Fenomena tersebut muncul bukan hanya karena kuatnya pengaruh perlintasan budaya dan paham multikulturalisme saat ini, tetapi juga akibat keadaan generasi muda masyarakat kita yang kurang melek spiritualitas dan pemahaman agamanya.

Ini semua adalah tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama, dalam menyiapkan generasi muda. Dengan demikian, yang kita butuhkan sekarang ini adalah model pendidikan agama yang mampu membentuk cara pandang terbuka, toleran, dan simpatik terhadap perbedaan, namun di sisi lain keimanan dan perwujudan syariat agama harus menjadi basis utama bagi pengembangan semua tatanan berpikir dan sikap sosial. *Wallahu a'lam bi al-shawab*

#### DAFTAR BACAAN

- M. Hanif Dakhiri, *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- A. Malik fadjar, 'Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren', dalam Nurcholish Madjid, *'Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan'*, Paramadina, Jakarta, 1997
- Ridwan Abawihda, Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, dalam Ismail SM (ed.) *'Dinamika Pesantren dan Madrasah'*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Rohmat Mulyana, Multikulturalisme dan Nilai Agama, <http://www.wahanakebangsaan.org>
- Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik, Upaya Konstruktif membongkar Dikotomi pendidikan Islam*, Ircisod, Yogyakarta, 2004
- Ali Usman (ed.), *Menegakkan Pluralisme, Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008
- Tilaar, H. A. R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2002

Paini Firda, *Pendidikan Pembebasan*, Jakarta, LP3S, 2000

Soparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, dalam [www. Multicultural](http://www.Multicultural)

Muhammad al-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, [www. Multicultural](http://www.Multicultural)

H. A. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2000

